

BAHAN PAPARAN

EVALUASI UU 25 TAHUN 2004

Oleh:
Dida H. Salya
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan
Semarang, 16 Mei 2013



1. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

“Apakah **INDONESIA** masih
membutuhkan **PERENCANAAN**?”
Jawabannya **YA**

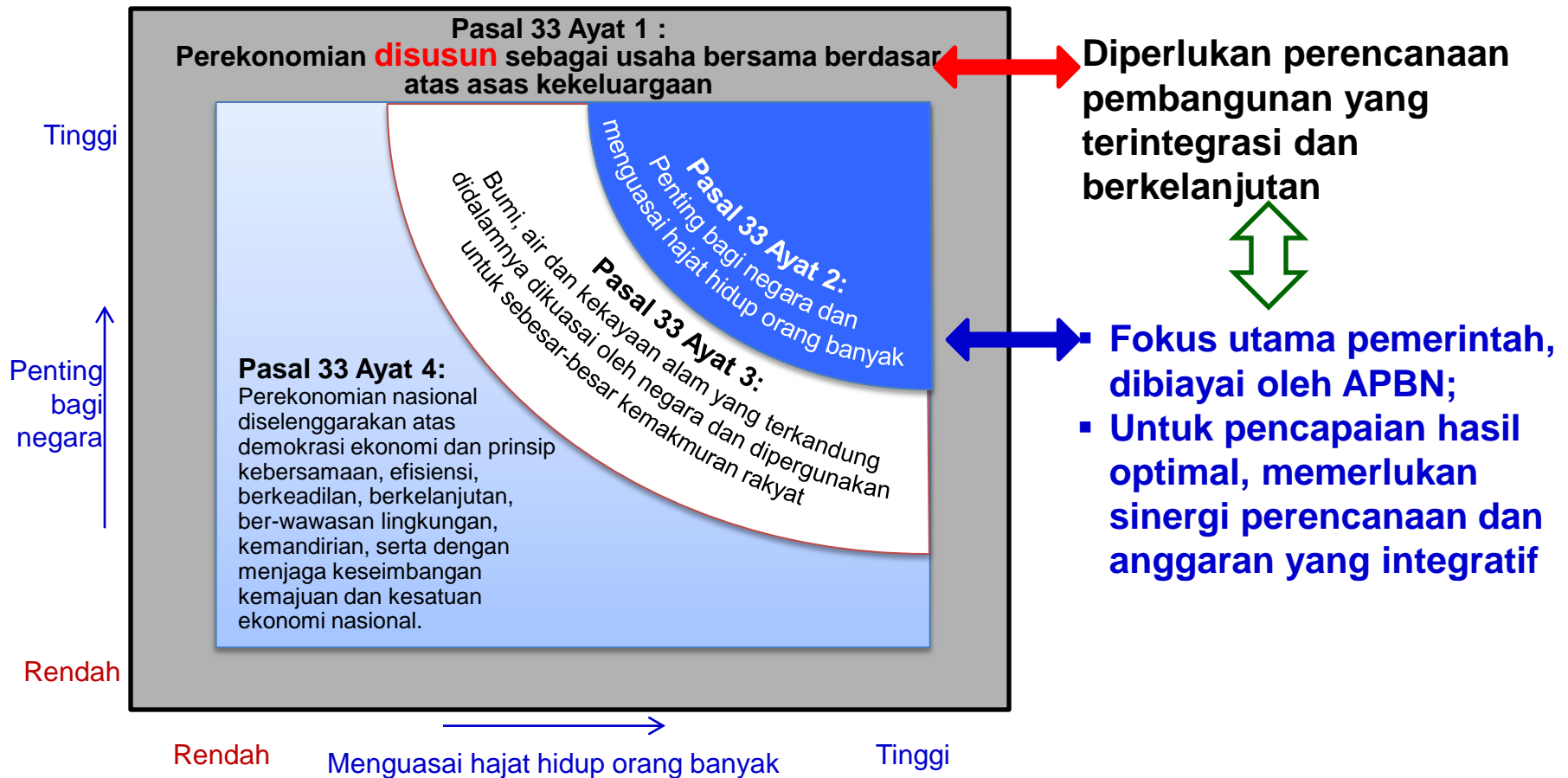


1. Menurut UUD 1945
2. Pembagian Kewenangan
3. Perubahan Lingkungan Strategis

**)Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU No. 25/2004 pasal 1 angka 1*

Menurut UUD 1945

Sistem perekonomian nasional berorientasi pada kemakmuran rakyat, memerlukan **perencanaan yang integratif (dengan anggaran)**, fokus dan konsisten dalam pencapaian tujuan pembangunan



VISI, MISI ABADI

Pembukaan UUD 45

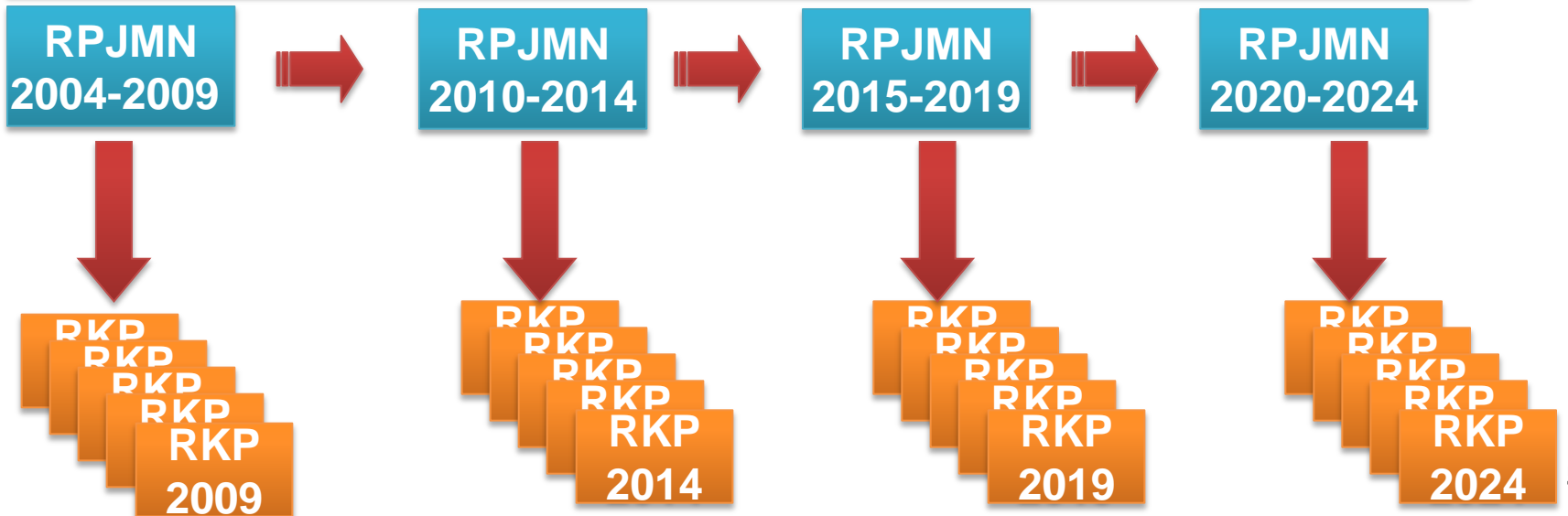
VISI

Negara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur

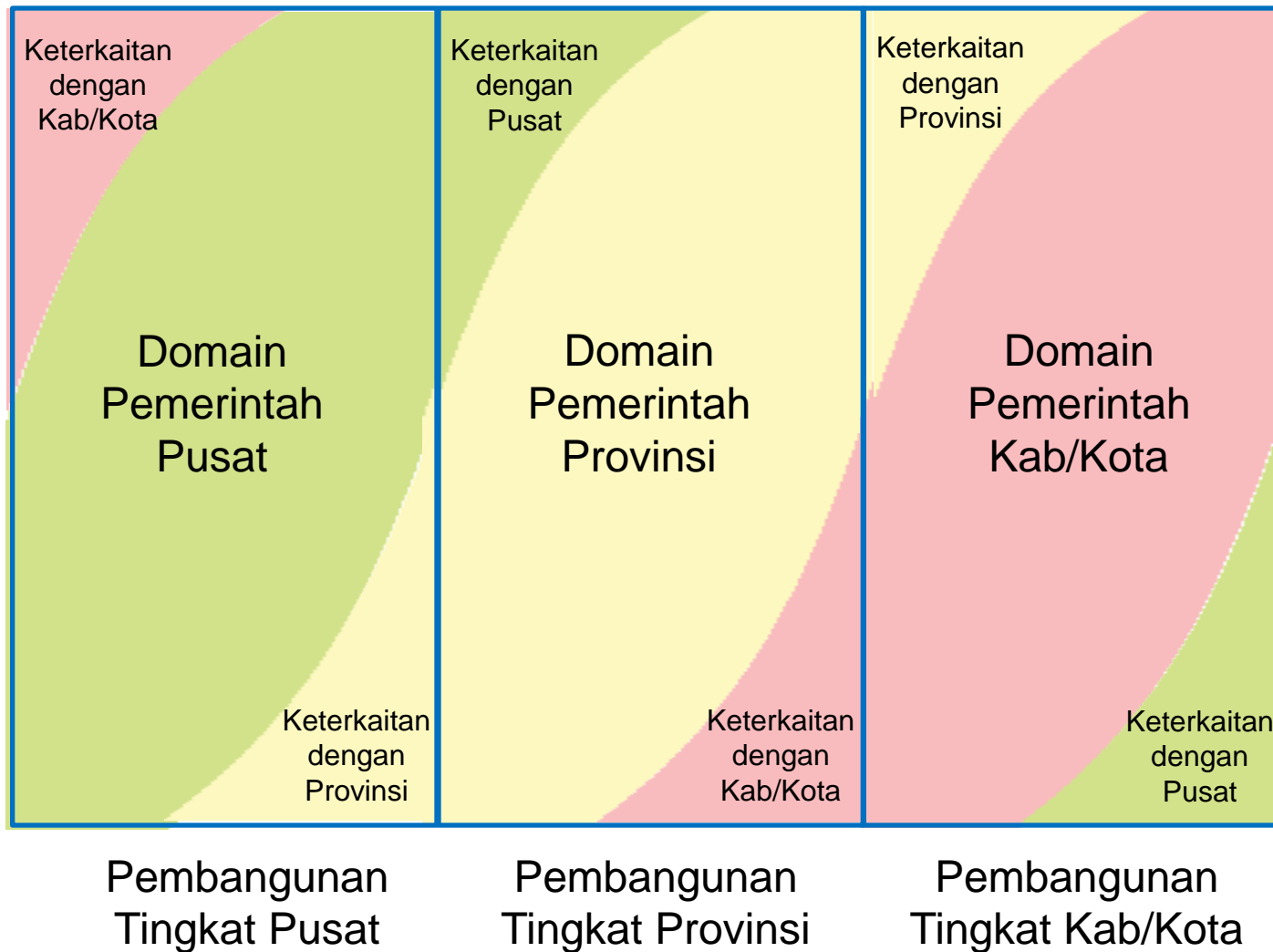
MISI

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan

R P J P N (Visi Misi Pembangunan, 2005-2025)



KETERKAITAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH



TANTANGAN: PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan:

- Perubahan iklim
- Pemanasan global
- Daya dukung dan daya tampung

Internal:

- Demokratisasi (Pemilu dan Pilkada)
- Amandemen UUD 1945, Peraturan perundangan
- Otonomi Daerah

Eketernal:

- Globalisasi
- Regionalisasi, AFTA, NAFTA, APEC

Tujuan Bernegara:

- Pembukaan UUD 1945

Perubahan Lingkungan Strategis



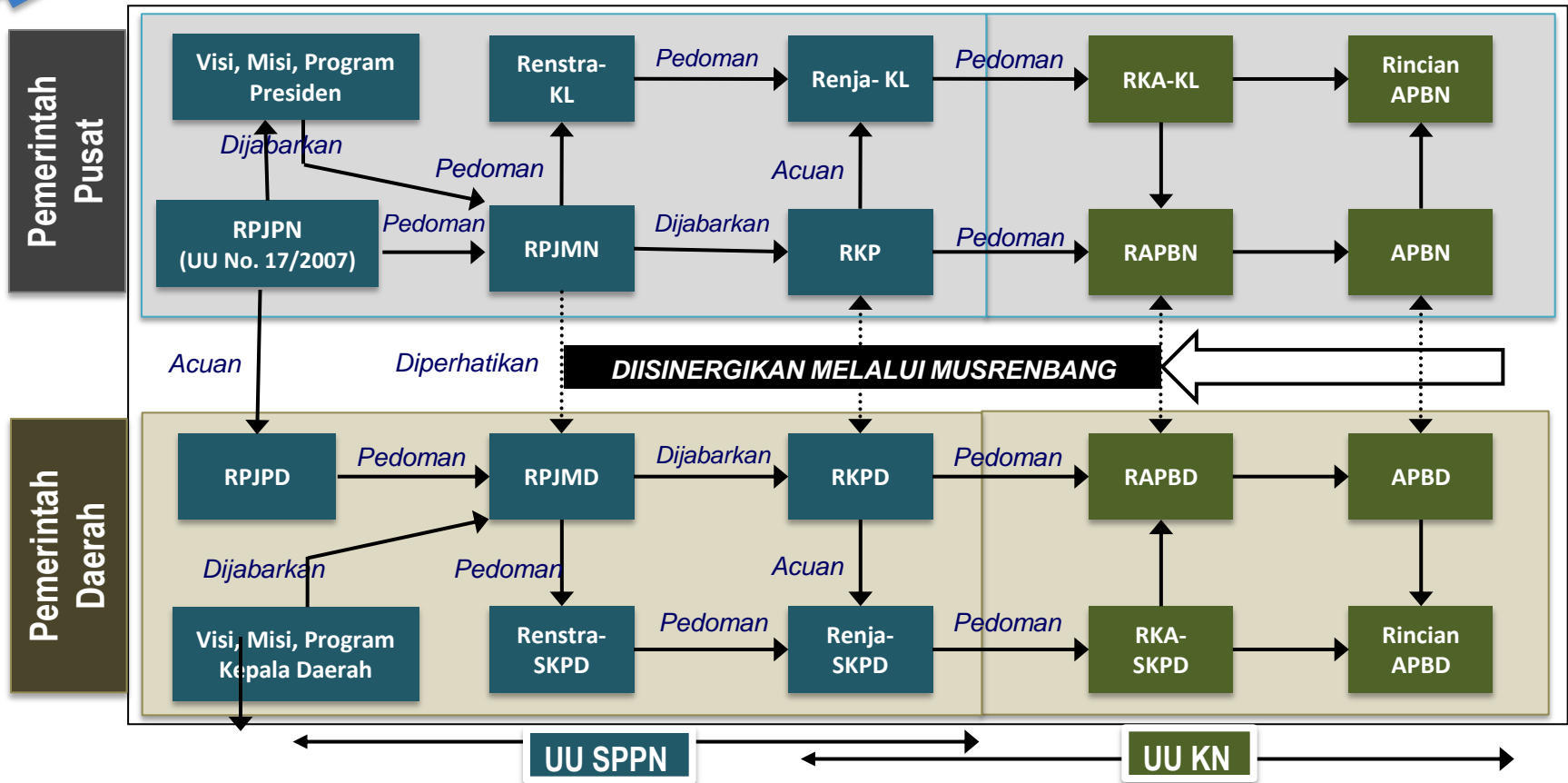
Sumberdaya:

- Kondisi geografis
- Keterbatasan SDA

Diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Terintegrasi

Menentukan arah pembangunan – Penetapan prioritas program – Optimalisasi sumberdaya
(UU No. 25 Tahun 2004; Pasal 1; Angka 1)

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN



- ✓ Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan **sinkronisasi** antara kebijakan perencanaan dan kebijakan penganggaran. UU no. 25/2004 (SPPN) dan UU 17/2003 (Keuangan Negara) masih perlu penyempurnaan untuk mendukung keterpaduan perencanaan dan penganggaran.

2. TANTANGAN SINERGITAS: KETIDAKSINKRONAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DEVIASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (1)

Terjadi deviasi dalam perencanaan (RKP) dengan dokumen anggaran (RKA-KL). Dapat diidentifikasi 29,4 % indikator kinerja prioritas RKP 2012 tidak terpetakan dalam RKA K/L tahun 2012

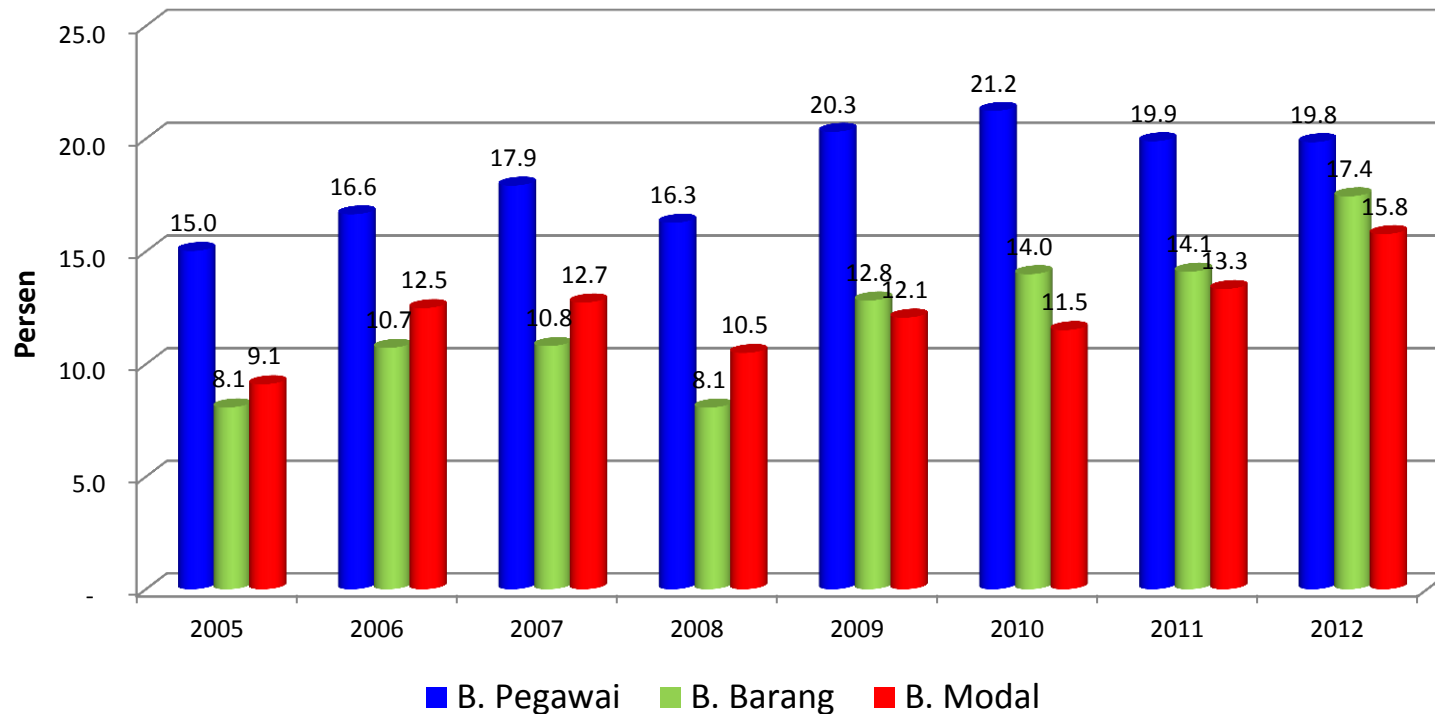
NO.	PRIORITAS DALAM RKP 2012 (BUKU I)	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	TERPETAKAN			%	JML. TIDAK TERPETAKAN	%
					LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
1	Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola	17	52	144	55	32	87	60,4	57	39,6
2	Prioritas Pendidikan	7	22	71	26	37	63	88,7	8	11,3
3	Prioritas Kesehatan	9	25	66	18	17	35	53,0	31	47,0
4	Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	28	60	153	91	27	118	77,1	35	22,9
5	Prioritas Ketahanan Pangan	27	80	322	227	22	249	77,3	73	22,7
6	Prioritas Infrastruktur	16	40	169	51	51	102	60,4	67	39,6
7	Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha	15	35	117	72	16	88	75,2	29	24,8
8	Prioritas Energi	13	27	80	41	16	57	71,3	23	28,8
9	Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	12	43	134	84	22	106	79,1	28	20,9
10	Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	25	64	219	121	12	133	60,7	86	39,3
11	Prioritas Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi	7	19	41	24	2	26	63,4	15	36,6
12	Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian	23	34	84	45	13	58	69,0	26	31,0
13	Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	17	53	19	13	32	60,4	21	39,6
14	Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	10	36	62	49	7	56	90,3	6	9,7
TOTAL		221	554	1.715	923	287	1.210	70,6	505	29,4

Catatan:

- Terpetakan langsung : terkait langsung antara indikator kegiatan yang ada di RKP dengan output kegiatan yang ada di RKA K/L, baik secara nomenklatur, maupun target/ volume kegiatan.
- Tidak terpetakan Tidak Langsung: Indikator kinerja yang tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara substansi terkait dengan output kegiatan yang ada di dokumen RKA K/L
- Tidak Terpetakan: Indikator kinerja yang ada di RKP tidak terkait sama sekali/ tidak dapat/sulit iterjemahkan dengan output kegiatan yang ada **10** dalam RKA K/L, baik nomenklatur maupun substansi.

DEVIASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (2)

Kenaikan Alokasi Belanja Barang di K/L yang cukup tinggi, menunjukkan menurunnya proporsi belanja untuk Keperluan Publik



Adanya kewenangan penggunaan anggaran yang besar kepada K/L (*let The manager manage*) menyebabkan porsi belanja untuk internal K/L (Belanja Pegawai dan Barang) lebih besar dibandingkan dengan porsi belanja untuk kepentingan Publik (Belanja Modal).

DEVIASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (3)

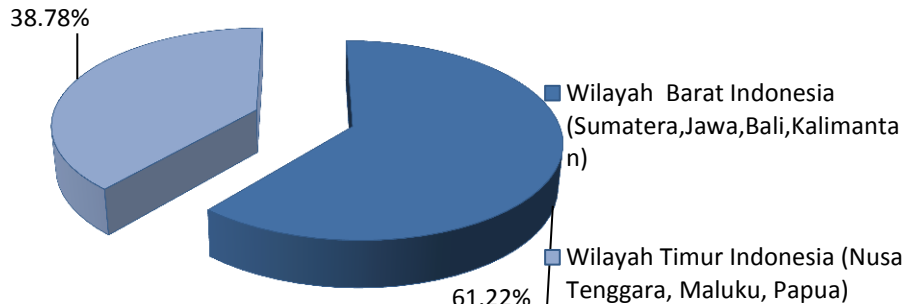
Ketidaksinkronan Dana Alokasi Khusus (DAK)

**Proporsi Alokasi DAK Infrastruktur Air
Minum 2012**



Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah

Proporsi Alokasi DAK Infrastruktur Jalan 2012



Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah

- Di dalam buku II RKP 2012 disebutkan sasaran umum pembangunan infrastruktur yang berfokus pada Indonesia bagian timur;
- Namun, dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya menjadi pendukung pencapaian prioritas nasional, alokasi DAK untuk infrastruktur jalan dan air minum di wilayah timur Indonesia hanya sekitar 30 % – 40%;
- Penentuan daerah penerima dan besar DAK per-daerah dilakukan pada siklus penganggaran, yakni saat dokumen perencanaan (RKP) telah ditetapkan.

3. SINERGI PUSAT – DAERAH: PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

RELEVANSI PERENCANAAN DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Amanat Konstitusi

- Pembukaan UUD 1945 → Kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan seluruh wilayah → Pemerataan

Konsepsi Wawasan Nusantara

- Kesatuan Wilayah Politik → Kesadaran bernegara
- Kesatuan Wilayah Ekonomi → Integrasi ekonomi nasional
- Kesatuan Wilayah Sosial → Kesadaran berbangsa
- Kesatuan Wilayah Budaya → Kesadaran berbudaya
- Kesatuan Wilayah Geografis → Keterkaitan wilayah
- Kesatuan Wilayah Hankam → Perlindungan dan pengamanan wilayah

Potensi Wilayah Maritim dan Kepulauan

- Penghubung wilayah, bukan pemisah wilayah

Penguatan Daya Saing Nasional

- Dibangun dari peningkatan daya saing wilayah

FAKTOR PEREKAT PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH

KESERASIAN TATA RUANG

INTEGRASI ANTAR WILAYAH

**JARINGAN EKONOMI
LOKAL-GLOBAL**

**“AS BASIS OF
REGIONAL DEVELOPMENT”**

**DESENTRALISASI DAN OTONOMI
DAERAH DI DALAM PENYEDIAAN
LAYANAN PUBLIK**

**“AS BASIS OF
WELFARE CREATION”**

**PENGEMBANGAN KEGIATAN
EKONOMI BERBASIS INFORMASI,
PENGETAHUAN DAN SUMBER
DAYA ALAM**

**“AS DRIVER OF
REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT”**



TANTANGAN: KETIMPANGAN ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH (1)

WILAYAH	DANA DEKON + TP		DANA PERIMBANGAN		INVESTASI PMA	
	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2008 (US \$ JUTA)	SHARE (%)
SUMATERA	37.213	15,65	62.138	27,65	1.133	11,29
JAWA-BALI	157.630	66,31	78.519	34,94	8.516	84,91
KALIMANTAN	11.721	4,93	30.487	13,57	283	2,82
SULAWESI	15.950	6,71	23.811	10,60	76	0,76
NUSA TENGGARA	5.995	2,52	9.965	4,43	8	0,08
MALUKU	4.278	1,80	5.889	2,62	7	0,07
PAPUA	4.942	2,08	13.890	6,18	5	0,05
TOTAL	237.729	100,00	224.698	100,00	10.030	100,00

Distribusi Dana Dekon + TP (%)

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 81,69
2. Kalimantan: 4,93
3. Sulawesi: 6,71
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 4,32
5. Papua: 2,08

Distribusi Dana Perimbangan (%)

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 62,59
2. Kalimantan: 13,57
3. Sulawesi: 10,60
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 9,30
5. Papua: 6,18

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BKPM

Distribusi Investasi PMDN (%)

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 86,78
2. Kalimantan: 7,19
3. Sulawesi: 5,26
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 0,08
5. Papua: 0,70

Distribusi Kredit Perbankan (%)

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 88,22
2. Kalimantan: 5,18
3. Sulawesi: 4,50
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 1,21
5. Papua: 0,59

WILAYAH	INVESTASI PMDN		KREDIT PERBANKAN		KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH	
	RATA-RATA 2005-2008 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)
SUMATERA	8.400	31,52	193.749	15,44	117.393	18,79
JAWA-BALI	14.729	55,26	913.352	72,78	408.768	65,43
KALIMANTAN	1.916	7,19	67.483	5,38	33.704	5,40
SULAWESI	1.402	5,26	56.483	4,50	43.281	6,93
NUSA TENGGARA	21	0,08	12.436	0,99	11.971	1,92
MALUKU	0,3	0,00	4.006	0,32	3.523	0,56
PAPUA	185	0,70	7.442	0,59	6.068	0,97
TOTAL	26.654	100	1.254.951	100	624.708	100,00

TANTANGAN: KETIMPANGAN ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH (2)

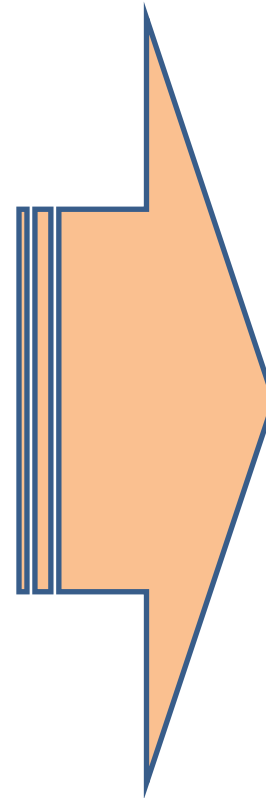
WILAYAH	DANA DEKON + TP		DANA PERIMBANGAN		INVESTASI PMA		INVESTASI PMDN		KREDIT PERBANKAN		KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH	
	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2008 (US \$ JUTA)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2008 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)
SUMATERA	37.213	15,65	62.138	27,65	1.133	11,29	8.400	31,52	193.749	15,44	117.393	18,79
JAWA-BALI	157.630	66,31	78.519	34,94	8.516	84,91	14.729	55,26	913.352	72,78	408.768	65,43
KALIMANTAN	11.721	4,93	30.487	13,57	283	2,82	1.916	7,19	67.483	5,38	33.704	5,40
SULAWESI	15.950	6,71	23.811	10,60	76	0,76	1.402	5,26	56.483	4,50	43.281	6,93
NUSA TENGGARA	5.995	2,52	9.965	4,43	8	0,08	21	0,08	12.436	0,99	11.971	1,92
MALUKU	4.278	1,80	5.889	2,62	7	0,07	0,3	0,00	4.006	0,32	3.523	0,56
PAPUA	4.942	2,08	13.890	6,18	5	0,05	185	0,70	7.442	0,59	6.068	0,97
TOTAL	237.729	100,00	224.698	100,00	10.030	100,00	26.654	100	1.254.951	100	624.708	100,00

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BKPM

1. Distribusi sumber daya selama kurun waktu 2005-2009 menunjukkan **sebagian besar terpusat** di Jawa-Bali.
2. Perlu langkah terobosan optimalisasi alokasi sumber daya untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, dan Sumatera antara lain:
 - (1) **“Location switching”** investasi pemerintah dari Wilayah Jawa-Bali ke Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, dan Sumatera.
 - (2) **“Strengthening Public-Private Partnership”** untuk Wilayah Jawa-Bali.
 - (3) **“Promoting Regional Banking”** untuk Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, dan Sumatera.

PERMASALAHAN SINERGI PUSAT DAN DAERAH

1. Belum efektifnya implementasi PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kurangnya koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
3. Kurangnya optimalnya kontribusi/dukungan pemerintah pusat dan sebaliknya.
4. Belum sinkronnya rencana pembangunan baik vertikal (antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) serta horizontal (antar sektor).
5. Adanya Tumpang Tindih atau duplikasi perencanaan antara Pusat dan Daerah



Kegiatan pembangunan tidak efisien (biaya tinggi) dan tidak efektif (manfaat pembangunan tidak optimal)

SINERGI PUSAT DAN DAERAH: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- ✓ Kegiatan K/L yang dibiayai APBN dan kegiatan SKPD yang dibiayai APBD belum sesuai.
- ✓ Nomenklatur dan kodifikasi kegiatan K/L (APBN) dan SKPD (APBD) belum seragam.

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN K/L

- Mengalihkan kegiatan Dekon dan TP ke daerah dalam DAK
- Mengoptimalkan Musrenbang.
- Mencantumkan lokasi kegiatan dalam Renja K/L dan RKA-K/L .
- Harmonisasi nomenklatur dan kodifikasi kegiatan K/L dan SKPD.

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA

- Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN, Renstra SKPD dan Renstra K/L, RKPD dan RKP,
- melakukan penajaman sasaran kegiatan SKPD dengan sesuai prioritas Renja K/L.

SINERGI PUSAT DAN DAERAH: PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Belum adanya keterpaduan dalam pengendalian dan evaluasi antara K/L dan SKPD sehingga terjadi duplikasi pengawasan, dan keterlambatan laporan pelaksanaan.

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN K/L

- Harmonisasi sistem dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (KemenPPN/Bappenas, Kemen Keu, KemenDagri, KemenPANRB, BPKP dan BPK).

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA

- Melakukan penataan dan penguatan SKPD dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

SINERGI PUSAT DAN DAERAH: PENATAAN REGULASI (1)

- ✓ Belum semua provinsi, kabupaten/kota memiliki Perda RTRW.
- ✓ Kurang sinkronnya peraturan perundang-undangan antarsektor terkait penataan ruang.

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN K/L

- Percepatan pembahasan Raperda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota (di BKPRN).
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan antar sektor terkait penataan ruang.

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA

- Percepatan penyusunan Raperda RTRW dan penyampaian kepada Pemerintah Pusat (BKPRN).
- Penguatan kapasitas BKPRD.

SINERGI PUSAT DAN DAERAH: PENATAAN REGULASI (2)

- ✓ Masih belum sinerginya kebijakan pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan investasi sektor riil baik PMA maupun PMDN.

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN K/L

- Penyediaan infrastruktur pendukung investasi serta kerangka regulasi untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA

- Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tiap daerah.

4. PENUTUP: SEBUAH PEMIKIRAN

PENUTUP

- ✓ Sinergi Perencanaan dan Penganggaran saat ini merupakan suatu kebutuhan untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan.
- ✓ Sinergi kebijakan Pemerintah Pusat (Sektor) dan Pemerintah Daerah (Spasial) adalah keniscayaan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- ✓ Oleh karena itu, partisipasi luas komponen masyarakat menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) bukan sekedar formalitas, namun harus menjadi kebutuhan.

Terima Kasih

